

TESIS

INKLUSI SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ASET DESA

*(Studi Kasus Desa Karang Sari, Kulonprogo dalam Mewujudkan
Pembangunan Inklusif)*

Dosen Pembimbing:

Drs. Lathiful Khuluq, MA, BSW. Ph.D



Oleh:

TRI HARIYONO

NIM: 15.200.110.55

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister**

Ilmu Sains Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2020

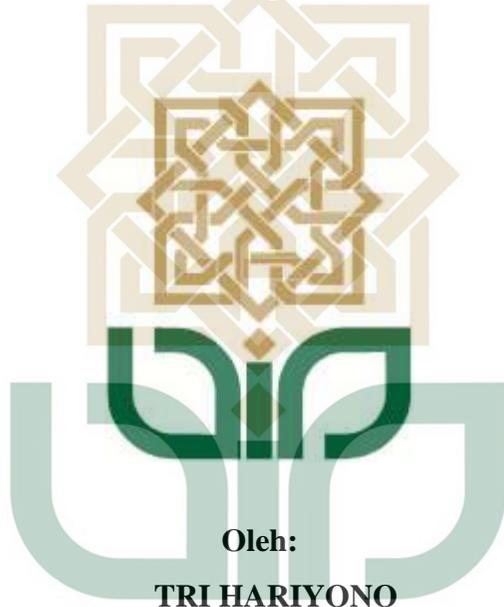
TESIS

INKLUSI SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ASET DESA

*(Studi Kasus Desa Karang Sari, Kulonprogo dalam Mewujudkan
Pembangunan Inklusif)*

Dosen Pembimbing:

Drs. Lathiful Khuluq, MA, BSW. Ph.D



Oleh:

TRI HARIYONO

NIM: 15.200.110.55

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister**

Ilmu Sains Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Hariyono
NIM : 15.200.110.55
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang saya rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 01 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Tri Hariyono

NIM: 15.200.110.55

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Hariyono
NIM : 15.200.110.55
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Tri Hariyono
NIM: 15.200.110.55

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-118/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : INKLUSI SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Kasus Desa Karangsari ,Kulonprogo Dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI HARIYONO, S.Sos.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520011055
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji II

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
NIP. 19680610 199203 1 003

Penguji III

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
NIP. 19810428 260312 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 30 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Pascasarjana
Direktur

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang berjudul:
**INKLUSI SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Kasus
Desa Karang Sari, Kulonprogo dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif)**

yang ditulis oleh:

Nama : Tri Hariyono
Nim : 15.200.110.55
Program : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Sains.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Pembimbing,


Drs. Lathiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D
NIP. 19680610 199203 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian dengan desain studi kasus di desa Karang Sari, Kulonprogo sebagai lokasi penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan realitas empiris dan mendalam tentang Inklusi Sosial dengan titik tekan pada: (1) Pengelolaan Aset Desa Karang Sari, (2) pengembangan ekonomi lokal (BUMDesa), dan (3) dinamika pengelolaan dan pemanfaatan aset desa beserta keberlanjutannya. Data Primer penelitian ini adalah data pokok berbentuk wawancara dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), dihimpun dari *stakeholders* yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset desa antara lain Pemerintah Desa (Pemdes), aktor perubahan desa dan warga masyarakat terutama Kelompok Rentan dan Marjinal (KRM). Pemilihan informan sebagai subjek penelitian dilakukan secara purposif dengan sistem bola salju (*Snow-Ball*). Sementara data sekunder berupa observasi dan dokumen (baik tulisan resmi ataupun milik pribadi untuk mendukung dan memperkuat pencatatan selama berlangsungnya penelitian) dikumpulkan melalui teknik dokumenter. Sedangkan analisis data dari upaya mencari dan menata secara sistematis catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menemukan bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Desa Karang Sari terintegrasi dalam satu wadah bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Binangun. Pengelolaan Aset Desa melalui BUMDesa ini mengelola aset desa yang berasal dari (1) aset kepemilikan dimiliki oleh desa, (2) Aset desa kepemilikannya oleh warga, dan (3) Aset desa kepemilikan oleh masyarakat. Sejak tahun 2018 mulai melibatkan KRM dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Inisiatif untuk melibatkan KRM dalam konteks PEL ini dapat dilihat dalam tiga sektor yaitu sektor pertanian dan peternakan, UMKM, dan pariwisata. Ketiga sektor ini dalam pengelolannya mulai menerapkan prinsip demokrasi ekonomi, inklusif, dan berkelanjutan.

Sedangkan dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi terdapat dinamika, pada masa kepemimpinan Kepala Desa (Kades) lama, otoritas Kades menjadi hal yang masih dominan, dan dalam setiap proses pembentukan keputusan publik terutama dalam PEL dilaksanakan secara prosedural-normatif sehingga yang terlibat hanya para elit formal desa. Kondisi tersebut berubah setelah adanya pergantian setelah kades lama habis masa kerjanya pada bulan Mei 2016 diganti oleh Sekretaris Desa (Sekdes) bapak Mujirin sebagai pejabat sementara Kepala Desa. Semula yang dijalankan dengan pola *top down*, berubah menjadi *bottom up* (apa yang dikendak warga masyarakat) serta dalam tata kelola pemerintahan mulai dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Terjadi peta perubahan ini tidak lepas dengan hadirnya Swara Nusa Institute pada bulan Desember tahun 2017 bersama dengan Pemdes menginisiasi, memperkuat KRM desa melalui PEL yang inklusif. Hasilnya adalah telah mendorong penguatan kelompok rentan dengan melalui inisiasi pembentukan Kelompok Difabel Desa, pendampingan kepada KWT, serta memberikan ruang partisipasi kelompok rentan dalam musdes RKPDesa, termasuk didalamnya membantu memasarkan produk-produk olahan dari kelompok rentan melalui BUMDesa.

Kata kunci: Inklusi Sosial, Pengembangan Ekonomi Lokal, Tata Kelola Aset Desa

MOTO

***Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik bagi kita
untuk masa depan***

(Aristoteles)¹



إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ قُلْ



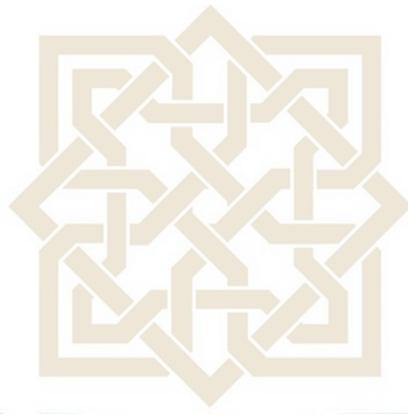
***Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri.²***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Kamaruddin Baro, *2000 Kata-Kata Mutiara* (Surabaya: Bina Ilmu), hal. 65

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1985), hal. 370.

PERSEMBAHAN



*Ku persembahkan karya ini
untuk almamater tercinta UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kerahmatan dan kemudahan kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penelitian ini bisa terselesaikan atas bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, penulis merasa sangat berkepentingan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. H. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro'fah BSW, MA, Ph.D, selaku Koordinator Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan, bapak Lathiful Khuluq, MA, BSW. Ph.D terima kasih banyak atas perhatian dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan tesis ini sehingga bisa terselesaikan.
5. Bung Iranda Yudhatama, S.Sos, M.I.Kom selaku Direktur Swara Nusa Institute Kulonprogo dimana penulis bekerja didalamnya dan bergulat dalam isu-isu advokasi dan pemberdayaan masyarakat, terimakasih saya haturkan.
6. Ayahanda Hadi Marwanto dan Ibunda Sumarmi kedua orangtua penulis kepada merekalah hasil akhir ini kupersembahkan.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga terimakasih atas pertemanan dengan kisah kasih yang tak akan pernah terlupakan.

8. Kepada Istri tercinta Fitri Yulianti dan buah hatiku Maulana Yusuf Setyo Aji terima kasih atas cinta kasih yang tulus dan tak henti-hentinya memberikan dorongan serta doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Keluarga dan teman-teman dekat penulis Jaya Bersama (Bumen Tari Nusantara, pakde kyai zubair, Gus Moy) terima kasih atas persahabatan kita selama ini dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
10. Serta berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian dan penulisan tesis.

Sleman, 01 Juli 2019

Penyusun,

Tri Hariyono



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i.
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAKSI.....	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	8.
E. Kerangka Teoritis	13
1. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan	13
2. Inklusi Sosial dalam Pengelolaan dan Pembangunan Desa.....	19
F. Metode Penelitian	24
1. Pendekatan Penelitian.....	24
2. Teknik Pengumpulan Data	24
a. <i>Indepth Interview</i>	25
b. Dokumentasi Data Skunder.....	27
3. Teknik Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II DESA KARANGSARI MENUJU PEMBANGUNAN INKLUSIF

A. Kondisi Geografis dan Potensi Desa	31
B. Kondisi Pemerintahan Desa.....	38
C. Kondisi Kelompok Rentan dan Marjinal.....	45
D. Kelembagaan Ekonomi Berbasis Aset Desa.....	48
1. Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi.....	48
2. Strategi Pengembangan Ekonomi Berbasis Aset Desa.....	49

**BAB III DINAMIKA PENGELOLAAN ASET DESA
KARANGSARI**

A. Aset Desa Karang Sari	57
B. Pengelolaan Aset Desa Karang Sari.....	61
1. Aset Kepemilikan Desa	61
2. Aset Kepemilikan Warga.....	68
3. Aset Kepemilikan Masyarakat.....	69
C. Dinamika Pengelolaan Kelembagaan Ekonomi	71
1. Sektor Pertanian dan Peternakan	77
2. Sektor UMKM	78
3. Sektor Pariwisata	79
D. Aset Desa bagi Kelompok Rentan dan Marjinal	81
E. Peta Perubahan Menuju Pengelolaan Aset Desa Inklusif.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-Saran.....	106
C. Kata Penutup	107

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia selama ini masih memfokuskan perhatian pada pertumbuhan yang mengandalkan investasi besar,¹ namun kurang mengikutsertakan rakyat kecil sebagai subyek dan bagian utama dari pembangunan. Pembangunan sosial masih dipandang sebelah mata dan hanya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat *residual*. Padahal, di negara-negara berkembang lainnya, pembangunan sosial sudah mulai menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi dan kedua elemen ini saling mendukung.² Akibat dari mengabaikan pembangunan sosial ini sering terjadi eksklusi pembangunan pada masyarakat bawah, rakyat miskin kurang mampu mengalami ketertutupan akses serta tertinggal dalam setiap proses pembangunan.

Dalam peta pembangunan, selama ini sering terlena oleh sekian janji bahwa paradigma pertumbuhan sebagaimana disinggung di atas, akan memakmurkan semua anggota masyarakat melalui *trickel-down*. Namun faktanya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah lapangan pekerjaan, apalagi menanggulangi kemiskinan.³ Paradigma ini menghalalkan penyitaan sebagian hasil

¹ Bulan Juli 2010, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR), misalnya, memperbaiki peringkat Indonesia hingga mencapai *Investment grade* (level investasi). Tidak mengherankan, investor portofolio membanjiri pasar keuangan domestik sejak akhir 2010 hingga 2011.

² Untuk kajian lebih dalam terkait dengan isu pembangunan sosial di negara berkembang, lihat Riant Nugroho, *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

³ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001), 70.

pembangunan oleh mereka yang telah mapan dan menyisakan sebagian kecil hasil pembangunan “diteteskan” kepada mayoritas rakyat. Untuk itu, diperlukan paradigma pembangunan baru yang secara adil dan merata melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pelibatan seluruh masyarakat secara aktif tersebut, memunculkan istilah pembangunan inklusif.⁴

Secara sederhana, pembangunan inklusif juga dapat disebut “pembangunan untuk semua” bukan pembangunan untuk individu atau sekelompok golongan atau lapisan masyarakat tertentu. Pendek kata, pembangunan inklusif dalam bahasa Adi Sasono, “hendak meraih kemajuan dan kemakmuran bersama dengan pergulatan kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian”.⁵ Meskipun bukan isu baru, tema pembangunan inklusif dewasa ini kian menarik perhatian dan dianggap penting, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). UU Desa melahirkan struktur kesempatan yang memungkinkan desa tumbuh berkembang menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kedudukan desa, dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, berubah menjadi subyek pembangunan, memiliki kewenangan dan anggaran yang cukup guna mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pihak supradesa (kabupaten, propinsi, dan

⁴ A Prasetyantoko, Sugeng Bahagiyo, dan Setyo Budiantoro, Prolog “Prospek dan Tantangan Pembangunan Inklusi di Indonesia”, dalam A Prasetyantoko, Sugeng Bahagiyo, dan Setyo Budiantoro ed. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES dan Prakarsa, 2012), 3.

⁵ Adi Sasono, *Menjadi Tuan Di Negeri Sendiri: Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian* (Jakarta: Grafindo Books Media, 2013).

pusat) tidak bisa lagi memperlakukan desa sebagai obyek pembangunan.⁶

Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana implementasi UU Desa sejauh ini? Sebagai subyek pembangunan, apakah desa sudah “menghadirkan negara” di tengah-tengah masyarakat desa? Kualitas kehidupan masyarakat desa, tanpa terkecuali, apakah telah menunjukkan gejala mengalami perubahan positif? Dua pertanyaan ini penting dan menarik untuk memeriksa kesinambungan antara struktur kesempatan dengan penggunaannya. Data-data yang dikumpulkan oleh beberapa lembaga riset tentang desa, Smeru (2016)⁷, IRE (2017),⁸ menunjukkan bahwa desa-desa mulai mengalami pergeseran cara pandang dalam berdesa. Meskipun demikian, beberapa riset tersebut juga menemukan sejumlah persoalan yang krusial terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, yaitu antara lain; (a) praktik akuntabilitas masih berdimensi administratif, belum kuat dalam dimensi substansi; (b) pemerintahan desa secara umum belum responsif terhadap aspirasi warga, terutama kelompok rentan dan marginal desa; (c) tata kelola pemerintahan desa belum diselenggarakan secara transparan; (d) praktik partisipasi masih semu dan cenderung formal prosedural; (e) penganggaran desa masih menampilkan politik anggaran yang bias kepentingan elit dan rentan menciptakan eksklusi sosial. Musyawarah desa yang bisa menjadi instrumen pelembagaan

⁶ Sutoro Eko, *et.al. Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: FPPD, 2014), 45-46.

⁷ *Studi Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Laporan Baselin, dalam <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/baselineuudesa.pdf> Akses tanggal 02 September 2018.

⁸ Dina Mariana, *et.al. Desa Situs Baru Demokrasi Lokal* (Yogyakarta: IRE, 2017)

inklusi sosial, ternyata belum didayagunakan; (f) Paham dan kesadaran warga desa, terlebih kelompok rentan dan marjinal, atas pentingnya tradisi berdesa masih memprihatinkan; dan (g) aset-aset desa belum dilakukan inventarisasi, sehingga desa belum mampu menyusun platform alternatif penghidupan masyarakat desa berbasis aset.

Dari beberapa masalah krusial di atas, persoalan penghidupan berbasis aset desa menjadi menarik dicermati. Berbicara mengenai aset tidak bisa lepas dari perspektif penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Aset dalam pengertian *sustainable livelihood* diletakkan sebagai suatu kekuatan individu dan komunitas untuk membangun penghidupannya. Aset dapat dilihat dari beberapa aspek atau yang biasa disebut dengan *pentagon aset* dengan melihat pada lima aspek yakni: (1) konteks, kondisi dan kecenderungan seperti: kebijakan desa, sejarah desa, demografi, kondisi makro dan mikro ekonomi desa, diferensiasi sosial, dan lain-lain; (2) sumber-sumber penghidupan yang ada di desa seperti: sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi/finansial, modal sosial, dan lain-lain; (3) proses pelebagaan dan struktur organisasi yang ada di desa; (4) strategi penghidupan (*livelihoodstrategy*); (5) *outcome* dari *sustainable livelihood*.⁹

Kelima aspek tersebut merupakan modal dasar yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh pemerintah desa dalam kerangka mewujudkan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang inklusif. Pembangunan inklusif dalam kerangka penghidupan

⁹ Chambers dan Conway, "Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st Century" (Institute of Development Studies, 1991), 6

berkelanjutan akan berlangsung ketika penghidupan tersebut mampu mengatasi dan memulihkan diri dari tekanan maupun goncangan, serta menjaga kemampuan dan aset-aset tersebut pada masa kini dan masa depan.¹⁰ Salah satu desa di Kabupaten Kulonprogo yang dalam proses membangun penghidupan berkelanjutan berbasis aset sebagai *evidence-based practice*¹¹ dalam memecahkan permasalahan krusial seperti pengangguran, ketimpangan, dan kesejahteraan adalah desa Karang Sari di Kecamatan Pengasih Kulonprogo.

Ada beberapa hal yang menarik sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan strategi penghidupan di desa Karang Sari ini, *pertama*, Selaian Desa Karang Sari merupakan desa yang cukup banyak memiliki potensi, baik potensi alam, sosial maupun budaya, juga menjadi desa pertama di kabupaten Kulonprogo yang dinobatkan sebagai desa teknologi informasi dimana setiap aktivitas dan potensi desa bisa diakses melalui jaringan internet.¹²

Kedua, Pemerintah Desa Karang Sari dalam pengelolaan aset desa serta penganggaran pembangunan desa sudah mulai melibatkan warga masyarakat masyarakat. Melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) mereka berpartisipasi ikut memberikan masukan dan usulan terkait dengan pembangunan

¹⁰ Sunaji Zamroni, *et.al. Desa Mengembangkan Sumber Penghidupan Berkelanjutan* (Yogyakarta: IRE Press, 2015), 13.

¹¹ Praktek-praktek pekerjaan sosial dengan memadukan antara teori dan praktek dalam berbagai studi kasus *evidence-based practice* bisa di lihat tulisannya Carol L. Langer dan Cynthia A. Lietz , *Applying Theory to Generalist Social Work Practice: A Case Study Approach* (Canada: Wiley, 2015).

¹² Laporan Assesment, "Problem-Problem Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif dan Memihak Kaum Rentan di Desa Karang Sari Kulonprogo", (Kulonprogo: Swara Nusa Institute, 2017), 2.

desa dan penataan ekonomi berbasis penghidupan berkelanjutan. *Ketiga*, hadirnya *Non Government Organization* (NGO) seperti Rifka Annisa, Sekolah Ekonomi Desa, Swara Nusa Institut turut memberikan kontribusi positif baik untuk Pemerintah Desa maupun untuk pengembangan masyarakat Karang Sari. Atas dasar ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan strategi penghidupan berkelanjutan di desa Karang Sari dengan fokus pada pengelolaan dan tata kelola aset desa yang memihak kelompok rentan dan marjinal menuju pembangunan yang inklusif.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari konteks peluang kelahiran UU Desa dalam memberikan kesempatan hadirnya *platform* penghidupan berkelanjutan yang dapat memperbaiki aspek akuntabilitas dan inklusi sosial dalam tata kelola aset di desa, ada beberapa persoalan penting yang mendesak untuk diselesaikan melalui penelitian ini:

1. Bagaimana pengelolaan aset desa di Karang Sari dalam konteks inklusi sosial?
2. Bagaimana pengembangan ekonomi lokal berbasis aset di Karang Sari dalam kerangka penghidupan berkelanjutan ?
3. Bagaimana dinamika pengelolaan dan pemanfaatan aset di desa Karang Sari serta seperti apa aspek keberlanjutannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung dinamika praktek inklusi sosial dan pengelolaan sumber daya

produktif di desa Karang Sari, Kulonprogo. Karena itu, penelitian ini akan:

1. Mengkaji kondisi terkini pengelolaan aset desa di Karang Sari dalam konteks inklusi sosial;
2. Mengkaji pengembangan ekonomi lokal berbasis aset desa di Karang Sari dalam kerangka penghidupan berkelanjutan;
3. Mengkaji dinamika pengelolaan dan pemanfaatan aset di desa Karang Sari beserta aspek keberlanjutannya.

Sementara itu dari segi kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka mengembangkan dan memperkaya teori-teori pekerjaan sosial sebagai disiplin ilmu. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini berguna:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pada umumnya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada khususnya, hasil penelitian ini akan memberikan bahan masukan yang berharga dalam kerangka melakukan program tata kelola aset desa yang inklusif serta memihak kelompok rentan dan marginal;
2. Bagi Pemerintah Desa Karang Sari, hasil penelitian ini penting untuk membuka jalan bagi pemdes dan pegiat desa ketika akan membuat kebijakan desa yang lebih responsif dan memihak kelompok rentan dan marginal dalam kerangka membangun penghidupan berkelanjutan;
3. Bagi Perguruan tinggi, hasil penelitian ini berguna untuk menambah khasanah pengetahuan tentang praktek-praktek pekerjaan sosial generalis baik pada level mezzo dan makro

terutama dalam konteks strategi penghidupan ekonomi yang inklusif.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masalah desa sudah banyak dilakukan, baik yang mengambil lokasi di Kulonprogo maupun yang dilakukan di luar DIY, namun berkaitan dengan persoalan tata kelola aset desa sebagai strategi penghidupan berkelanjutan terutama untuk melindungi dan memihak kelompok rentan dan marjinal di desa belum banyak dilakukan. Sepanjang penelusuran penulis terutama studi terkait dengan isu desa terdapat dua kecenderungan tulisan. *Pertama* tema tentang demokratisasi desa dan *kedua* berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan kawasan pedesaan.

Tema tentang demokratisasi desa bisa ditemui dalam tulisan Sutoro Eko, dkk. (2013), *Daerah Inklusif*, pada dasarnya tulisan ini hendak menempatkan daerah inklusif sebagai sebuah konsep yang mencakup semuanya (*one for all*), yakni menjadi wadah bagi desentralisasi, pembangunan, demokrasi lokal dan kesejahteraan. Tema seputar otonomi daerah tersebut sekaligus juga memaparkan aktor-aktor penting dalam panggung otonomi daerah, yakni kiprah masyarakat sipil mendemokraskan daerah seperti kiprah perusahaan melalui CSR-nya yang bisa didorong untuk menjadi katalis perubahan dengan memanfaatkan dana, pengetahuan dan jaringan, seperti halnya lembaga-lembaga donor lainnya.¹³ Sedangkan tentang pembangunan demokrasi lokal dan kesejahteraan bisa di lihat dalam tulisan lainya Sutoro Eko, dkk.

¹³ Sutoro Eko, et.al. *Daerah Inklusif: Pembangunan Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan* (Yogyakarta: IRE, 2013), xxxviii-xxvix

(2014), *Desa Membangun Indonesia*, dengan pintu masuk pembangunan desa, tulisan ini menampilkan refleksi baru yang relevan dengan UU Desa dan perkembangan desa, sekaligus mendiskripsikan pelajaran berharga dan pengalaman empirik yang diperoleh dari banyak desa diharapkan menjadi contoh kongkret inspirasi dalam implementasi UU desa.¹⁴

Melengkapi contoh kongret tentang praktek-praktek implementasi UU desa hasil penelitian Dina Mariana, dkk, (2017), *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*, yang merupakan peneliti IRE ini menyajikan petikan-petikan ringkasan (*snapshots*) atas skala tantangan yang dihadapi oleh desa, bahwa upaya untuk membangkitkan ulang tata nilai pemandu kehidupan sosial desa (berdesa) yang selama ini disubsitusi oleh program teknokratis dan rekayasa penyeragaman kelembagaan oleh negara masih terbawa dalam skema otonomi desa, bahkan kerap lebih mendominasi dan memperumit upaya untuk memperkuat kepemimpinan, partisipasi warga dan representasi yang lebih bermakna ditingkat desa.¹⁵

Sedangkan praktik-praktik berkaitan dengan advokasi untuk mewujudkan desa inklusif bisa dijumpai dalam tulisan Ishak Salim, dkk. (2015), *Indonesia dalam Desa Inklusi*,¹⁶ dengan mengkaji dan menfokuskan penyandang disabilitas sebagai isu utamanya, Ishak Salim, dkk berusaha menjelaskan permasalahan dilapangan terkait dengan inklusi, dari mulai sarana kehidupan sehari hari, pekerjaan hingga permasalahan kebijakan diruang-ruang publik terkait difabel. Praktek advokasi lainnya dapat ditemui dalam tulisan

¹⁴ Sutoro Eko, *et.al. Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: FPPD, 2014), x

¹⁵ Dina Mariana, *et.al. Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal* (Yogyakarta: IRE, 2007), vi-vii

¹⁶ Ishak Salim, *et.al. Indonesia dalam Desa Inklusi* (Yogyakarta: SIGAB, 2015)

Ratih Prabosiwi, (2017), *Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas*,¹⁷ dengan menfokuskan pada konsep terkait perubahan paradigma pembangunan berkelanjutan dan peluang serta kewajiban desa dalam inklusi sosial. Peneliti menunjukkan bahwa inisiatif untuk membentuk desa inklusi telah muncul di beberapa wilayah yang didorong dari kesadaran untuk meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

Selain itu terdapat juga penelitian Fajar, (2016), *Empowerment Kaum Difabel dalam Arena Publik*,¹⁸ dengan tema advokasi dan pemberdayaan masyarakat kelompok rentan (difabel) yang dilakukan oleh LSM SIGAB di DIY, terutama dalam hal mewujudkan desa inklusif melalui program Rintisan Desa Inklusif (RINDI). Tujuan dari program ini adalah membangun perspektif disabilitas pada level desa, Kecamatan, dan Kabupaten agar keterlibatan difabel mulai diakui dengan pelibatan dan partisipasi dan proses pengambilan kebijakan dan penganggaran dilingkup pemerintahan desa. Akhir tujuan dari pelebagaan desa inklusi ini adalah agar tercipta suatu arus tindakan (praktik sosial) yang berorientasi pada nilai inklusif dan difabilitas.

Berbeda dengan peneliti sebelumnya, Muhammad Irsyadul Ibad dan Tanti Budi Suryani (2017), *Dari Desa Terbuka Menuju*

¹⁷Ratih Prabosiwi “Desa Inklusi sebagai Purwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas”, dalam *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* Volume 41 No. 3 Desember 2017, 215-226.

¹⁸ Fajar, *Empowerment Kaum Difabel dalam Arena Publik: Studi Kasus Program Rintisan Desa Inklusi SIGAB Yogyakarta* (Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006)

Desa Inklusif,¹⁹ Dakelan, dkk. (2016), *Mewujudkan Desa Inklusif*,²⁰ memberikan gambaran terkait bagaimana mewujudkan desa inklusif dengan melakukan perencanaan dan penganggaran melalui perencanaan partisipatif yang *pro poor* dan responsif gender, hal ini merupakan wahana untuk mempraktekan prinsip-prinsip tata kelola demokratis dan *good governance*. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan peta jalan, tulisan Rikardo Simarmata & R. Yando Zakaria, (2017), *Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi*,²¹ memberikan peta jalan arah penyelenggaraan dan pembangunan desa yang inklusif dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan tema tentang pengembangan ekonomi dan kawasan pedesaan dapat ditemukan dalam penelitian Agung Budi Santoso, (2017), *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset*.²² Dalam penelitiannya di desa Ponggok, Polaharjo Klaten, pemberdayaan warga masyarakatnya melalui yaitu Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Tirta Mandiri berhasil: (1) meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), (2) Desa Ponggok dapat

¹⁹ Muhammad Irsyadul Ibad dan Tanti Budi Suryani “Dari Desa Terbuka Menuju Desa Inklusif” *Jurnal Wacana: Meretas Jejak Kesejahteraan Desa*. Nomor 37/Tahun XIX/2017, 29-78

²⁰ Dakelan, et.al. *Mewujudkan Desa Inklusi: Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016)

²¹ Ricardo Simarmata dan R. Yando Zakaria, “Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi”, *Jurnal Wacana : Meretas Jejak Kesejahteraan Desa*. Nomor 37/Tahun XIX/2017, 7-27.

²² Agung Budi Santoso, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset: Studi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Polaharjo, Klaten* (Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017)

menggulirkan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) peningkatan ekonomi warga, serta (4) pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Sunadji Zamroni, dkk. (2015), *Desa Mengembangkan Sumber Penghidupan Berkelanjutan*,²³ studi ini untuk memberikan jawaban alternatif terhadap pendekatan *mainstream* dalam program pengentasan kemiskinan. Sebagai ganti atas pendekatan berbasis masalah (*problem based approach*), yang selama ini menjadi arus utama yang mendominasi kebijakan pengentasan kemiskinan, penelitian ini menawarkan pendekatan berbasis aset (*aset based approach*) yang menekankan kemampuan desa untuk mengatasi persoalannya sendiri dengan berbasis sumberdaya di dalam desa.

Ketiga, tulisan yang dihimpun oleh Anang Zakaria (ed), *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia* (2017).²⁴ Studi ini merupakan agenda bersama yang dilakukan oleh komunitas lembaga periset kebijakan (IRE, AKATIGA, dan Sajogyo Institute) yang selama ini menaruh perhatian pada isu desa dan kawasan pedesaan. Perdebatan mengenai pengembangan ekonomi lokal yang penting diperiksa kembali gagasan diajukannya konsep efisiensi sosial, pentingnya lembaga perantara, dan pergeseran ekonomi moral ke ekonomi modern. Kehadiran ekonomi baru, seperti koperasi BUMDesa, kelompok usaha bersama dimanfaatkan untuk transformasi ekonomi desa dan kawasan pedesaan.

²³Sunaji Zamroni, *et.al. Desa Mengembangkan Sumber Penghidupan Berkelanjutan* (Yogyakarta: IRE Press, 2015)

²⁴ Serta Anang Zakaria (ed), *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Pedesaan* (IRE, AKATIGA dan Sujogno Institute, 2017).

Dari beberapa kajian pustaka sebagaimana dipaparkan di atas, penelitian ini cenderung masuk dalam kategori kedua yaitu tema tentang pengembangan ekonomi dan kawasan pedesaan, strategi penghidupan berkelanjutan melalui pengelolaan dan tata kelola aset desa yang inklusif serta memihak kelompok rentan dan marjinal menjadi bahasan utama. Perbedaan bidang akademik antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu membawa konsekuensi pada perbedaan fokus penelitian dan pembahasan. Dengan demikian, meskipun secara tematik penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun bidang akademiknya berbeda serta fokus penelitian dan pembahasannya juga berlainan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini melibatkan dua variabel konsep, yaitu kehidupan berkelanjutan dan inklusi sosial. Deskripsi teori dalam kerangka teoritis ini mengelaborasi teori-teori dimaksud dalam konteks tata kelola aset desa yang inklusif.

1. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan

Gagasan dan konsep penghidupan yang layak (*sustainable livelihood* - SL) tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Robert Chambers di pertengahan 1980-an, yang kemudian dikembangkan oleh Chambers, Conway, dan para ahli yang lain di awal tahun 1990-an. Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh banyak lembaga internasional sebagai alternatif pendekatan pembangunan pada awal 1990-an yang dipicu dari maraknya kasus kelaparan dan kerawanan pangan

di sejumlah negara pada tahun 1980-an.²⁵ Momentum klimaks atas kritik tersebut bermuara pada tahun 1992 di *World Summit for Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Ujung kritik tersebut memunculkan Agenda 21 yang berisikan komitmen tentang pembangunan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pemerintah Inggris termasuk yang terdepan mempraktikkan agenda 21 ini, dengan menerapkan konsep *sustainable livelihood* sebagai pendekatan utama dalam program-program bantuan pembangunan di seluruh penjuru dunia melalui *Department for International Development* (DFID). Dalam mengusung konsep *sustainable livelihood* ini ke seluruh penjuru dunia, DFID mengadaptasi pemikiran Chambers and Conway (1992) yang menyebutkan bahwa penghidupan (*livelihood*) terdiri dari kemampuan, aset dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) akan berlangsung ketika penghidupan tersebut mampu mengatasi dan memulihkan diri dari tekanan maupun goncangan, serta menjaga kemampuan dan aset-aset tersebut

²⁵ Haidar, "Sustainable Livelihood Approach: The Framework, Lessons Learnt from Practice and Policy Recommendations," 2009. Untuk Kajian lebih dalam tentang maraknya kasus kelaparan dan kewaranan pangan disejumlah negara pada tahun 1980an dan dewasa ini bisa dilihat dalam bukunya Vandana Shiva, *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*, terj. Hira Jhamtani (Jakarta: yayasan Obor, 1997), Paul McMahon, *Berebut Makan: Politik Baru Pangan*, terj. Roem Topatimasang (Yogyakarta: Insist Press, 2017).

pada masa kini dan masa depan.²⁶ Berbicara tentang aset penghidupan, para ahli seperti Chambers and Conway (1992), meyakini bahwa seseorang dalam melangsungkan kehidupannya membutuhkan setidaknya lima aset penting guna melangsungkan penghidupan yang berkelanjutan, yaitu; aset alam (*natural capital*), aset manusia (*human capital*), aset fisik (*physical capital*), aset sosial (*social capital*), dan aset keuangan (*financial capital*). Kelima aset inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan *pentagon assets*,²⁷ dengan melihat pada lima aspek yakni: (1) konteks, kondisi dan kecenderungan seperti: kebijakan desa, sejarah desa, demografi, kondisi makro dan mikro ekonomi desa, diferensiasi sosial, dan lain-lain; (2) sumber-sumber penghidupan yang ada di desa seperti: sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi/finansial, modal sosial, dan lain-lain; (3) proses pelebagaan dan struktur organisasi yang ada di desa; (4) strategi penghidupan (*livelihoodstrategy*); (5) *outcome* dari *sustainable livelihood*.²⁸ Bagan dibawah ini menjelaskan alur kerangka penghidupan berkelanjutan dimaksud.

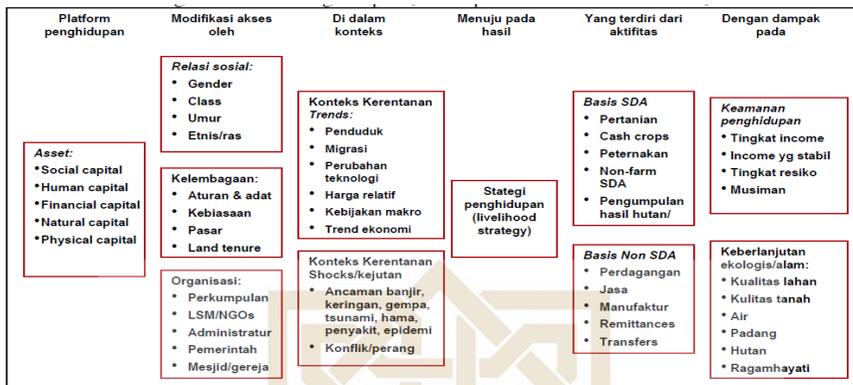
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁶ Chambers dan Conway, "Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st Century" (Institute of Development Studies, 1992), 6

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*,10

Tabel.1.1
Sustainable Livelihood Framework
 (Chambers and Conway, 1992)



SL Framework; Saragih, dkk. (2007)

Dari Bagan di atas yang dikembangkan oleh Chambers and Conway, menjelaskan bahwa nalar yang dikedepankan dalam studi *livelihood* adalah aset, akses, strategi mempertahankan dan/atau mengembangkan, serta hasil-hasil yang diperoleh. *Pertama*, aset. Aset yang dipahami dalam kerangka kerja tadi terdiri dari 5 bentuk, yaitu; *natural capital* (N), *human capital* (H), *physical capital* (P), *social capital* (S), dan *financial capital* (F). Sedangkan menurut IRE didasarkan pada hasil riset dan advokasi di beberapa desa di Indonesia meyakini ada satu bentuk aset yang penting dilibatkan dalam portofolio aset, yaitu aset politik (*political capital*). Aset politik menjadi penting dibedakan dengan aset sosial, karena realitas kehidupan sosial masyarakat di Indonesia pada umumnya, hal-hal yang bertalian dengan organisasi politik,

jaringan politik dan identitas politik turut berpengaruh dalam platform penghidupan.²⁹

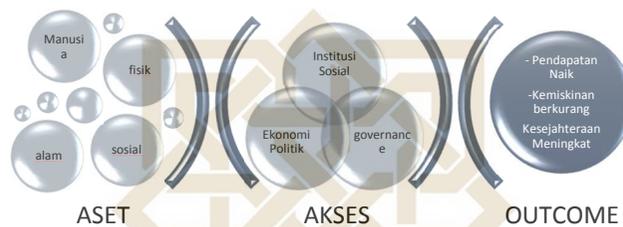
Kedua, akses. Aset-aset yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan belum tentu ada, atau meskipun ada namun belum tentu menguasai aset tersebut. Pengadaan aset dan/atau kemampuan menguasai aset tertentu membutuhkan pintu masuk, jalur atau penghubung. Inilah yang disebut dengan akses. Dalam konteks pengadaan dan/atau kemampuan penguasaan aset dapat diwujudkan melalui relasi sosial, kelembagaan dan organisasi. Relasi sosial, seperti pandangan atas gender, etnisitas, umur, bisa membatasi atau memungkinkan seseorang atau rumah tangga memperoleh aset tertentu (sewa ruko, membeli sawah, memperoleh upah). Demikian pula dengan tata nilai sosial, adat tradisi atau kebiasaan (kelembagaan) berperan penting dalam menentukan keputusan seseorang atau rumah tangga untuk melepas atau menguasai aset tertentu.

Dengan relasi sosial dan kelembagaan, organisasi pun sangat nyata perannya dalam mempengaruhi keputusan, kemauan atau kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam menguasai aset-aset untuk melangsungkan penghidupannya. Dalam interaksi antara seseorang atau rumah tangga (*massa*) dengan organisasi atau struktur sosial (*elite*), sering memunculkan motif-motif ekonomi politik diantara para aktor yang terlibat. Organisasi pemerintahan termasuk yang turut andil mempengaruhi dalam menyediakan akses atas sumberdaya penghidupan. Aktor dalam organisasi

²⁹ Sunaji Zamroni, et.al. *Desa Mengembangkan Sumber Penghidupan*, 18

pemerintahan bisa menjadi peredam motif ekonomi politik yang berlebihan atau kenafian lokalitas yang membelenggu. Karena itu cara pandang dalam membangun keterkaitan aset/sumber daya dengan akses yang disediakan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Alur Pengurangan Kemiskinan Berbasis Aset



Sumber: Laporan Riset, IRE-Pemda Gunungkidul (2012)

Ketiga, strategi penghidupan. Seseorang hidup atau rumah tangga melangsungkan penghidupannya, setelah menguasai aset/sumberdaya melalui aksesnya dalam berelasi sosial/bertata nilai/berorganisasi, selanjutnya memikirkan keberlanjutan atas penguasaan dan pengelolaan aset/sumberdaya tersebut. Inilah yang disebut dengan strategi penghidupan. Seseorang atau rumah tangga akan berjabaku mencari dan memilih strategi penghidupan yang sesuai, berdaya tahan ampuh dan berhasil guna bagi kelangsungan sumber penghidupan. Strategi yang dipilih bagi seseorang atau rumah tangga bisa beragam. Sebagai contoh rumah tangga di pedesaan. Secara umum pedesaan memiliki aset alam (N) dalam bentuk sawah, sehingga mayoritas penghidupan warga desa bersumber dari aset ini. Namun demikian, perkembangan

dan dinamika sosial ekonomi memberi alternatif beragam selain mengandalkan aset alam (N). Mereka bisa memilih strategi di luar pertanian selain masih tetap bertani di desa (diversifikasi penghidupan). Namun demikian, mereka bisa memilih strategi bermigrasi ke daerah tujuan yang memberikan kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan lebih tinggi. Secara ringkas bisa kita padatkan pemahaman tentang strategi penghidupan ini, yaitu portofolio penghidupan berkelanjutan seseorang atau rumah tangga bisa ditempuh melalui strategi di sektor pertanian, sektor non pertanian dan/atau melakukan migrasi.

Keempat, outcomes penghidupan. Ujung dari penguasaan, pengelolaan dan strategi penghidupan adalah hasil (*outcomes*) penghidupan. Kepemilikan aset, bahkan beragam aset, kecakapan dalam berelasi sosial, dalam mengembangkan tata nilai sosial dan menjadi bagian dari organisasi sosial maupun berelasi dengan pemerintahan, inilah yang mencirikan penghidupan (*livelihood*). Keragaman platform aset dan portofolio penghidupan ini akan berujung pada peningkatan pendapatan, kesejahteraan (keluar dari kemiskinan), kelembaman terhadap kerentanan (*vulnerability*) atau tekanan/guncangan ekonomi (*shocks*), atau bahkan kelangsungan kesempatan ekonomi yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya (*sustainability*).³⁰

³⁰ *Ibid.*, 22-25

2. Inklusi Sosial dalam Pengelolaan dan Pembangunan Desa

Sejauh ini cara untuk mendefinisikan inklusi sosial (*social inclusion*) adalah dengan mengacu pada definisi eksklusi sosial (*social exclusion*). Nabin Rawal, dengan mengutip P. Francis, mendefinisikan eksklusi sosial sebagai suatu proses yang membuat individu atau kelompok tertentu tidak dapat berpartisipasi sebagian atau sepenuhnya, dalam kehidupan sosial mereka.³¹ Dengan membalikkan definisi tersebut, maka inklusi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk dapat berpartisipasi sebagian atau seluruhnya dalam kehidupan sosial mereka.³²

Kelompok-kelompok yang mengalami eksklusi dalam pembangunan maupun kehidupan sosial biasa diberi nama sebagai kelompok rentan atau biasa sering disebut sebagai *vulnerable group* yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, buruh migran, masyarakat Adat, Kelompok Minoritas Etnis dan kerumpunbangsaan, kelompok minoritas keagamaan dan kepercayaan, serta kelompok LGBT dan Orang Dengan HIV/Aids (ODHA).³³ Sedangkan kelompok yang punya asosiasi dengan kelompok rentan adalah kelompok marginal. Kelompok marginal biasanya dikaitkan dengan kemiskinan sekalipun tidak selalu demikian, mencakup

³¹ Nabin Rawal, "Social Inclusion and Exclusion: A Review", dalam Dhaulagiri *Journal of Sociology and Anthropology*, Volume 2, Tahun 2008.161-180.

³² *Ibid*, 171.

³³ Eko Riyadi dan Syarif Nur Hidayat, ed. *Vulnerable Groups: Kajian dan Menakisme Perlindungannya* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012),145-505.

perempuan miskin, penduduk miskin dan kelompok minoritas agama.³⁴

Menurut Witcher (2003), bahwa kondisi miskin dan termiskinkan warga negara salah satunya dapat dijelaskan dengan konsep *social exclusion*. Konsep ini merujuk pada ketidakmampuan warga negara untuk mengakses berbagai fasilitas dan sumberdaya yang dapat dijadikan sebagai kapital dalam memberdayakan potensi mereka. Konsep *social inclusion* memberikan tekanan pada pembukaan ruang-ruang sosial sehingga warga negara miskin bisa dengan leluasa masuk dan bertransaksi didalamnya. transaksi tersebut menurut Witcher, tidak mesti dilakukan dengan *currency* yang berupa uang. Dalam relasi sosial, *human* atau modal sosial dapat juga menjadi modal dalam bertransaksi secara sosial.³⁵

Selain itu, dalam mendorong untuk membuka ruang-ruang sosial bagi warga penting dalam proses pembuatan keputusan, didasarkan pada keterlibatan aktif aktor-aktor sosial, dengan memberikan tekanan yang kuat pada keterlibatan warga negara yang sebelumnya dan biasanya dipinggirkan.³⁶ Dorongan pelibatan warga negara dalam pengambilan keputusan jelas sekali berasal dari berbagai problem ketersumbatan saluran-saluran aspirasi. *Inclusion* dengan demikian adalah bagian penting untuk membongkar ketersumbatan tersebut.

³⁴ Lihat kajian yang dilakukan oleh Akatiga, *Kelompok Marjinal dalam PNPB-Perdesaan* (Bandung: Akatiga, 2010).

³⁵ Sally Witcher, *Reviewing the Terms of Inclusion: Transactional Processes, Currencies and Context*. CASE paper, No. 67 (London: Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, 2003), 1-75.

³⁶ Michel Pimbert, M dan Tam Wakeford, 2001. *Overview: Deliberative Democracy and Citizen Empowerment* (PLA Notes, No. 40. Februari, 2001), 25.

Di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat bentuk inklusi sosial dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, didasarkan pada sasaran kelompok marginal. Bentuk pertama berupa pengakuan atas masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan pada hak asal-usul dan susunan asli (subsidiaritas). Pengakuan tersebut memberi kesempatan pada masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Bentuk kedua inklusi sosial dalam UU Desa berupa pemberian kesempatan kepada kelompok miskin dan perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan desa, serta pembangunan desa. Sedangkan bentuk ketiga inklusi sosial dialamatkan kepada semua warga desa, termasuk kelompok marginal, untuk berpartisipasi dalam penataan desa, perencanaan desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.³⁷

Pada Sub bagian ini hanya akan menekankan pemaparan terkait bentuk kedua dan ketiga. UU Desa menentukan bahwa inklusi sosial berlangsung di sejumlah arena yang meliputi: *penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembuatan peraturan*. Dalam keempat arena tersebut inklusi sosial tampak dalam dua wujud, yaitu, *pertama*, hak kelompok marginal meliputi: (i) hak untuk berpartisipasi; (ii) hak mendapatkan layanan dan informasi; dan (iii) hak untuk mengawasi. *Kedua*, kewajiban pemerintahan desa mencakup:

³⁷ UU Desa pasal 8 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1).

(i) keharusan menyelenggarakan pemerintah dengan prinsip-prinsip tertentu (demokratis, non-diskriminatif); dan (ii) keharusan berkoordinasi dan melibatkan semua kelompok kepentingan dalam desa.³⁸

Pada arena *penataan desa* inklusi sosial terlihat dalam bentuk keharusan penetapan dan perubahan status desa dilakukan atas prakarsa atau kehendak masyarakat. Pada arena ini inklusi sosial ditujukan pada semua warga desa termasuk kelompok marginal. Wujud inklusi sosial berupa hak warga desa untuk berpartisipasi (penetapan dan perubahan status desa). Pada arena *penyelenggaraan pemerintahan desa*, inklusi sosial nampak dalam wujud kewajiban pemerintahan desa maupun hak masyarakat. Pada wujud yang pertama inklusi meliputi: (i) penyelenggara pemerintahan desa (kepala desa, perangkat desa, anggota BPD) diwajibkan menjalankan pemerintahan desa dengan prinsip-prinsip tertentu seperti demokratis, partisipatif, berkeadilan gender dan non-diskriminatif; (ii) pemerintahan desa diwajibkan menjalin koordinasi dan kerjasama dengan semua kelompok kepentingan di desa; dan (iii) pemerintahan desa diharuskan menyertakan kelompok perempuan dan masyarakat miskin dalam musyawarah desa. Adapun wujud berupa hak masyarakat meliputi: (i) hak warga desa untuk mengawasi kegiatan pemerintahan desa, berpartisipasi dalam pemilihan umum, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dan hak

³⁸ Ricardo Simarmata dan R. Yando Zakaria, *Perspektif Inklusi Sosial*, 10-11.

kelompok perempuan untuk memiliki wakil di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁹

Inklusi pada arena *pembangunan desa* tampak dalam: (i) keterlibatan warga desa dalam perencanaan desa lewat masyawarah desa; (ii) ikut serta menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa; (iii) mendapatkan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan (iv) terlibat dalam pendirian BUM Desa. Inklusi pada arena ini tidak dikhususkan pada kelompok marginal tertentu melainkan kepada semua kelompok marginal.⁴⁰ Wujud inklusi sosial hanya muncul dalam bentuk hak kelompok marginal baik untuk berpartisipasi (musdes perencanaan desa, tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan desa, pembentukan BUM Desa) maupun mendapatkan informasi terkait perencanaan & pelaksanaan pembangunan. Sedangkan di arena *pembuatan peraturan* inklusi sosial terlihat pada hak warga desa untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan peraturan desa. Sasaran inklusi sosial pada arena ini adalah seluruh kelompok marginal.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian dengan desain studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu

³⁹Pasal 24 huruf d, j dan k, Pasal 26 Ayat (4), Pasal 29, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 63, dan Pasal 64 ayat 1 huruf d, Pasal 68 Ayat (1), dan Pasal 58 Ayat (1).

⁴⁰ Pasal 68 Ayat (1), Pasal 80 Ayat(1), Pasal 82 Ayat (1) dan (5), dan Pasal 88 Ayat (1).

⁴¹ Ricardo Simarmata dan R. Yando Zakaria, *Perspektif Inklusi Sosial*, 12

kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.⁴² Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang “kaya” untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yin mengungkapkan bahwa terdapat enam bentuk pengumpulan data dalam studi kasus yaitu: (1) dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel; (2) rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender dsb; (3) wawancara biasanya bertipe open-ended; (4) observasi langsung; (5) observasi partisipan dan (6) perangkat fisik atau

⁴² Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

kultural yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni dan lain-lain.⁴³

Karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dengan melakukan interaksi langsung dengan subyek—para informan, ditempuh dengan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam). *Interview* dilakukan kepada para informan di desa, baik dari unsur aktor perubahan desa, masyarakat desa maupun pemerintah desa. Informan utama yang akan diwawancarai antara lain kepala desa, sekretaris desa, kasek atau kaur, ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, KWT, Karang Taruna, Pokdarwis dan sebagainya), kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa), Organisasi masyarakat sipil lain di desa, dan warga masyarakat umum, utamanya warga masyarakat marjinal seperti perempuan, warga miskin, penyandang disabilitas, dan juga petani. Sementara data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat pencatatan selama berlangsungnya penelitian. Data ini berupa observasi maupun dokumen tertulis baik resmi ataupun milik pribadi yang dikumpulkan melalui teknik dokumenter.

a. *Indepth Interview* (Wawancara Mendalam)

Wawancara dilakukan dengan sejumlah narasumber yang telah ditargetkan di lokasi penelitian yang meliputi (a) Kelompok Rentan dan marjinal desa Karang Sari (2) Para Aktor Perubahan Desa Karang Sari, (3) Pemerintah desa

⁴³ *Ibid.*, 67

Karangsari serta dapat dikembangkan pada narasumber lainnya. Wawancara dengan kelompok rentan dan marjinal desa Karangsari dilakukan secara informal, dengan melakukan kunjungan rumah maupun berdialog (ngobrol) di tempat-tempat yang memungkinkan dimana keterlibatan peneliti bisa dikembangkan. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin. Agar tidak mengubah suasana asli, dalam wawancara tidak digunakan alat rekam; demikian pula tidak dilakukan pencatatan langsung atas jawaban informan. Pencatatan atau transkripsi hasil wawancara dilakukan segera setelah selesai wawancara. Data yang dihimpun dalam wawancara dengan para responden dari kelompok rentan meliputi data tentang kondisi terkini pengelolaan aset desa di desa Karangsari serta bagaimana dinamika pengelolaan dan pemanfaatan aset desa beserta aspek keberlanjutannya dalam konteks pengembangan ekonomi lokal sebagai basis penghidupan.

Selanjutnya, wawancara dengan Aktor Perubahan desa Karangsari dilakukan secara formal di rumah yang bersangkutan atau ditempat lain yang dimungkinkan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, namun sejauh dimungkinkan, dilakukan wawancara mendalam dengan mengembangkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan selama proses wawancara. Dalam wawancara dengan Aktor Perubahan Desa Karangsari dilakukan perekaman atau pencatatan langsung atas jawaban responden. Data yang dihimpun dalam wawancara meliputi (1) bagaimana pengelolaan dan

pemanfaatan aset yang ada di Desa Karang Sari, (2) seperti apa aspek keberlanjutannya dalam konteks pengembangan inklusi sosial, dan (3) bagaimana dinamika pengelolaan dan pemanfaatan aset desa serta keberlanjutannya dalam konteks pengembangan ekonomi sebagai basis penghidupan berkelanjutan.

Sementara itu, wawancara dengan pejabat Pemerintah Desa Karang Sari dilakukan secara formal dan dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, sejauh yang dimungkinkan dalam wawancara digunakan alat perekam (*tape recorder*); bila tidak memungkinkan menggunakan alat perekam, maka pencatatan atas jawaban informan dari kalangan pejabat pemerintah dilakukan secara langsung dalam proses wawancara. Data yang dihimpun dalam wawancara dengan para responden dari Pemdes Karang Sari meliputi: (1) bagaimana kondisi terkini pengelolaan aset desa dan (2) bagaimana pengembangan ekonomi lokal berbasis aset di Desa Karang Sari dalam kerangka penghidupan berkelanjutan, serta (3) seperti apa dinamika pengelolaan dan pemanfaatan aset desa serta seperti apa keberlanjutannya dalam konteks inklusi sosial. Pemilihan informan sebagai subjek penelitian, baik dari kelompok rentan dan marjinal, Para Aktor Perubahan Desa, maupun pejabat pemerintah desa, dilakukan secara purposif dengan sistem bola salju (*snow-ball*). Informan yang terpilih sebagai subjek penelitian sekaligus diperlakukan sebagai sampel.

b. Dokumentasi Data Skunder

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Proses pencarian data dokumenter dilakukan peneliti dengan mengakses sumber-sumber yang relevan, bergantung pada jenis data dokumenter yang diperlukan, bisa dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Data pribadi diakses melalui informan, sementara data resmi—karena bersifat publik—seperti data demografi dan data terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dapat diakses secara langsung oleh peneliti pada otoritas yang berwenang. Data sekunder berupa dokumen tertulis yang dicari berupa data demografis seperti jumlah penduduk, komposisi penduduk berdasarkan kategori-kategori ekonomi-sosial-budaya dan data lain yang mendukung. Data sekunder yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: RPJMDesa, RKP Desa, dan APBDesa, Monografi Desa, serta Perdes yang relevan dengan penelitian, dan Dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan atau unit yang dapat dikelola,

mensistematikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, proses analisis data, seperti halnya proses pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan secara bertahap. Analisis dimulai sejak pengumpulan data. Setiap informasi yang diperoleh diuji silang (kroscek) melalui komentar informan yang berbeda atau melalui observasi untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi lanjutan. Selanjutnya, data dikategorisasikan sesuai (1) kondisi kelompok rentan dan marjinal, (2) dinamika pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, dan (3) aspek keberlanjutannya dalam pengembangan atau penciptaan sumber penghidupan bagi kelompok rentan dan marjinal. Semua data yang telah terkumpul, disaring, disusun dalam kategori-kategori, dan diuji-silang, kemudian ditafsirkan dengan cara saling menghubungkan data yang disusun dalam kategori-kategori untuk menemukan “hubungan inti”. Melalui cara inilah proses penyimpulan dibuat.⁴⁴ Dalam melakukan analisis data dengan langkah-langkah tersebut di atas, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan data (deskripsi) dan penafsiran

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 147.

data (analitis)⁴⁵; atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.⁴⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab, dengan rincian sub-babnya masing-masing. **Bab Pertama** adalah Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. **Bab Kedua** mendeskripsikan Desa Karang Sari Menuju Pembangunan Inklusif. Dalam bab kedua ini diberikan gambaran umum seputar desa Karang Sari yang meliputi Kondisi Geografis dan potensi desa, Kondisi pemerintahan desa, Kondisi kelompok rentan dan marjinal desa Karang Sari, dan kelembagaan ekonomi berbasis aset desa.

Bab Ketiga membahas dinamika pengelolaan aset desa Karang Sari. Pembahasan dimulai aset desa Karang Sari, Pengelolaan aset desa Karang Sari, Dinamika pengelolaan kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa), Aset bagi kelompok rentan dan marjinal desa, dan diakhiri dengan peta jalan perubahan menuju aset desa yang inklusif. **Bab Keempat** adalah penutup. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dikemukakan bab ini. Bab keempat ditutup dengan saran.

⁴⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),166.

⁴⁶ Charis Zubair dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 65.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengangkat permasalahan pokok mengenai Inklusi Sosial dalam pengelolaan aset desa di Karang Sari, Pengasih, Kulonprogo sebagai studi Kasus, serta berusaha untuk menemukenali terkait dengan Pengelolaan Aset Desa Karang Sari, Kelembagaan ekonomi desa berbasis aset, serta dinamika dalam pengelolaan aset Desa Karang Sari beserta aspek keberlanjutannya. Berdasarkan pembahasan serta analisis yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Desa Karang Sari

Aset Desa Karang Sari berdasarkan status kepemilikannya terdapat tiga bagian; (1) aset kepemilikan dimiliki oleh desa, (2) Aset desa kepemilikannya oleh warga, dan (3) Aset desa kepemilikan oleh masyarakat. Dalam pengelolaan aset desa ini yang terintegrasi dalam satu wadah bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Binangun adalah aset desa yang dimiliki oleh pemdes. Melalui skema BUMDesa ini mengelola aset desa tersebut mulai melibatkan kelompok rentan dan marjinal.

Inisiatif dari Pemerintah Desa terkait untuk melibatkan masyarakat terutama kelompok rentan dalam pengelolaan aset desa perlu direspon bersama terutama dalam konteks pengembangan ekonomi lokal dibawah BUMDesa, skema kelembagaan ekonomi desa Karang Sari dengan mendorong

untuk melakukan tiga prinsip kelembagaan ekonomi desa yaitu prinsip demokrasi ekonomi, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Dinamika dalam pengelolaan aset desa di Karang Sari

Dalam perencanaan pengelolaan desa yang berbasis aset, warga desa terutama kelompok rentan dan marginal merupakan aktor utama (subyek) yang harus dilibatkan. Hal ini dikarenakan selama ini kelompok rentan dan marginal relatif diabaikan dan dijadikan obyek dari proses pembangunan desa. Situasi ini terjadi dimasa kepemimpinan kepada desa lama dimana otoritas kepala desa menjadi hal yang masih dominan, akhirnya dalam setiap proses pembentukan keputusan publik di desa Karang Sari dilaksanakan secara prosedural-normatif dan hanya memenuhi syarat administrasi sehingga kemudian yang terlibat para elit-elit formal desa.

Kondisi tersebut berubah setelah adanya pergantian setelah kades lama habis masa kerjanya pada bulan Mei 2016 diganti oleh Sekretaris Desa (Sekdes) bapak Mujirin sebagai pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa. Semula yang dijalankan dengan pola *top down*, berubah menjadi *bottom up* (apa yang dikendak warga masyarakat) serta dalam tata kelola pemerintahan mulai dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Terjadi peta perubahan ini tidak lepas dengan hadirnya Swara Nusa Institute pada desember tahun 2017 bersama dengan Pemdes menginisiasi, memperkuat KRM desa melalui PEL yang inklusif. Hasilnya adalah telah mendorong penguatan kelompok rentan dengan melalui inisiasi pembentukan Kelompok Difabel Desa, pendampingan

kepada KWT, serta memberikan ruang partisipasi kelompok rentan dalam musdes RKPDesa, termasuk di dalamnya membantu memasarkan produk-produk olahan dari kelompok rentan melalui BUMDesa.

B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam rangka penelitian, berikut ini direkomendasikan beberapa butir saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Pemerintah Desa Karang Sari
 - a. Melibatkan kelompok rentan dan marginal dalam proses perencanaan dan penganggaran desa baik melalui forum formal maupun informal. Contoh (1) Musdus, Musrenbangdes, Musdes; (2) Sambung rasa berbasis RW dan Sektoral; (3) Ngopi Sore (Diskusi Santai di Bale Desa setiap seminggu sekali)
 - b. Membuat Program Pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi kelompok rentan (KDD, KWT, Pemuda, dll) dengan berbasis pada potensi dan asset yang ada di Desa Karang Sari. Beberapa hal agenda bisa dijalankan diantaranya (1) Meningkatkan kapasitas kelompok rentan baik dalam pengetahuan dan ketrampilan terkait produk atau jasa yang akan menjadi sumber penghidupan mereka; (2) Membuat Pasar Inklusi untuk mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa kelompok rentan dengan melibatkan Pokdarwis dan Pemuda sebagai penyelenggaran event.

c. Mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai institusi ekonomi desa yang mampu meningkatkan PADesa dan kemanfaatan bagi kelompok rentan melalui pengelolaan potensi dan asset desa secara inovatif. Misal: (1) Membuat Galery dan *Co working space* di Balai desa sebagai ruang kreatifitas (workshop) dan ruang pameran produk kelompok rentan.

2. Saran untuk Pemerintah Kabupaten

Pemerintah kabupaten sebaiknya membuat regulasi untuk memastikan adanya alokasi APBDesa yang diperuntukan bagi pengembangan ekonomi desa yang inklusif. Desa sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pengembangan ekonomi desa yang inklusif, guna mendorong lahirnya aksi kolektif warga untuk memecahkan persoalan ekonomi di desa.

C. Kata Penutup

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimanapun, penulis merasa telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyelesaian penyusunan ini, yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual penulis dimasa depan terutama dalam isu-isu kontemporer pekerjaan sosial di Indonesia.

Tesis ini merupakan hasil optimal yang dapat penulis usahakan, dan penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Sungguhpun demikian, penulis menyadari tidak ada yang sempurna dalam kerja yang manusiawi.

Hal ini terlebih lagi berlaku untuk Tesis ini, yang ditulis oleh seorang yang dalam proses berlatih. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun substansi isi tulisan ini selalu penulis harapkan; dan setiap kritik dan saran akan selalu diterima dengan senang hati.

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian penyusunan penelitian ini. Penulis ingin menegaskan bahwa tesis ini merupakan kenangan terakhir bagi almamater tercinta ini, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun pada akhirnya penulis harus meninggalkan almamater tercinta ini dan semua orang yang pernah menjadi guru dan sahabat penulis disini, namun semuanya akan tetap hidup dalam kenangan penulis untuk selamanya. *Insya Allah.*



DAFTAR PUSTAKA

- Akatiga, *Kelompok Marjinal dalam PNPB-Perdesaan*. Bandung: Akatiga, 2010.
- Budi Hardiman, F. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Budi Santoso, Agung. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset: Studi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Tirta Mandiri, Desa Pongok, Polaharjo, Klaten*. Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Dakelan, dkk. *Mewujudkan Desa Inklusi: Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016.
- Fajar, *Empowerment Kaum Difabel dalam Arena Publik: Studi Kasus Program Rintisan Desa Inklusi SIGAB Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001.
- Langer, Carol L. dan Cynthia A. Lietz, *Applying Theory to Generalist Social Work Practice: A Case Study Approach*, Canada: Wiley, 2015.
- Mariana, Dina. *et.al. Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: IRE, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Nugroho, Riant. *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Prasetyantoko, A. Sugeng Bahagiyo, dan Setyo Budiantoro, Prolog “Prospek dan Tantangan Pembangunan Inklusi di Indonesia”, dalam A. Prasetyantoko, Setyo Budiantoro, Sugeng Bahagia, ed. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*, Jakarta: LP3ES dan Prakarsa, 2012.
- Riyadi, Eko dan Syarif Nur Hidayat, ed. *Vulnerable Groups: Kajian dan Menakisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Salim, Ishak. *et.al. Indonesia dalam Desa Inklusif*. Yogyakarta: SIGAB, 2015.
- Saragih, Sebastian. *et.al. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan: Sustainable Livelihood Framework*. Jakarta: Hivos-Circle, 2017.
- Sasono, Adi. *Menjadi Tuan Di Negeri Sendiri: Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian*. Jakarta: Grafindo Books Media, 2013.
- Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sunaji Zamroni, *et.al. Desa Mengembangkan Sumber Penghidupan Berkelanjutan*. Yogyakarta: IRE Press, 2015.
- Sutoro Eko, *et.al. 2013. Daerah Inklusif: Pembangunan Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*, Yogyakarta: IRE.
- , *et.al. Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD, 2014.
- Tri Hariyono dan Iranda Yudhatama, *Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi*, Kulonprogo, Swara Nusa Institute dan VOICE, 2018.

Zubair, Charis dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Yin, Robert K. 2002, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir, Jakarta: Raja Grafindo Persada

ARTIKEL/PAPER

Chambers, Robert. and Gordon R. Conway, *Sustainable Livelihoods: Practical Concepts for The 21st Century*. Sussex: IDS Discussion Paper 296, Institute for Development Studies, 1991.

Haidar, 2009. "Sustainable Livelihood Approach: The Framework, Lessons Learnt from Practice and Policy Recommendations,"

Iranda Yudhatama, Tri Hariyono dan Porcarius Mahi, "Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi (PADI)", *Policy Brief SNI 2019*

Laporan Assesment, "Problem-Problem Tata Kelola Aset Desa yang Inklusif dan Memihak Kaum Rentan di Desa Karangari Kulonprogo, Kulonprogo: Swara Nusa Institute, 2017.

Mariana, Dina. Angga, RD. 'Membangun Kemandirian Berbasis Aset Desa', *Policy Brief IRE*, Februari 2016.

Michel Pimbert, M dan Tam Wakeford, 2001. *Overview: Deliberative Democracy and Citizen Empowerment*, PLA Notes, No. 40. Februari, 2001

Prabosiwi, Ratih. "Desa Inklusi sebagai Purwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas", dalam *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* Volume 41 No. 3 Desember 2017.

Rawal, Nabin. "Social Inclusion and Exclusion: A Review", dalam *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*. Volume 2, Tahun 2008.

Simarmata, Ricardo dan R. Yando Zakaria, “Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi”, *Jurnal Wacana: Meretas Jejak Kesejahteraan Desa*. Nomor 37/Tahun XIX/2017.

Sutaryono, ‘Pengelolaan Aset Desa: Pengembalian Hak Desa Berdasarkan Konstitusi’, *Policy Brif IRE* no 11 Febuari 2014.

Witcher, Sally. *Reviewing the Terms of Inclusion: Transactional Processes, Currencies and Context*. CASE paper, No. 67. London: Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, 2003.

RUJUKAN WEB

Studi Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Laporan Baselin, dalam <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/baselineuudesa.pdf> Akses tanggal 02 September 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PANDUAN WAWANCARA

1. Posisi Kelompok Rentan dan Marjinal

a. Peta Kelompok Marjinal

- Siapa saja yang diidentifikasi sebagai kelompok marjinal di desa?
- Apa yang menyebabkan mereka mengalami marjinalisasi?
- Apa saja aset yang dimiliki kelompok marjinal
- Bagaimana sumber penghidupan kelompok marjinal?
- Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kelompok marjinal (terutama penyandang disabilitas)

b. Keterlibatan kelompok marjinal dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif

- Apakah ada inisiatif khusus untuk menggali pendapat kelompok marjinal dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa? Apa konten isinya.
- Apakah ada inisiatif untuk menghadirkan kelompok rentan dan marjinal dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran didesa?
- Bagaimana metode yang digunakan untuk menggali pendapat kelompok marjinal?
- Apakah ada organisasi sektoral yang didasarkan kepada identitas kemarjinalannya didesa?
- Apakah hasil penganggaran partisipatif sudah sesuai dengan kebutuhan mereka?

- Apakah mereka dilibatkan juga dalam pengawalan pelaksanaan kebijakan penganggaran tersebut (implementasinya)?

c. *Keterlibatan kelompok marjinal dalam pengelolaan aset desa*

- Apakah aset desa yang dimiliki desa digunakan untuk kepentingan warga?
- Apakah aset desa tersebut sudah mengakomodir seluruh pihak, terutama bagi mereka (kelompok marjinal)?
- Bagaimana akses kelompok marjinal dalam pengelolaan aset? adakah keterlibatan mereka dalam pengelolaan aset tersebut?
- Bagaimana mereka membuka aset sehingga bisa dilibatkan dalam pengelolaan aset?

2. **Aset**

- a. Apa saja aset yang ada di desa? (*jenis-jenis aset yang ada di desa*)
- b. Siapa saja pemilik dan pengelola aset-aset strategis yang ada di desa? Apa saja aset yang dimiliki oleh desa (pemdes)?
- c. Bagaimana pengelolaan aset yang ada di desa? (*menggali tentang siapa dan bagaimana keterlibatan mereka*)
- d. Siapa saja pemilik dan pengelola aset-aset strategis yang ada di desa?
- e. Bagaimana sejarah kehidupan masyarakat desa?

- f. Bagaimana pengaruh modal dari luar terhadap pengembangan ekonomi desa?
- g. Apakah pengelolaan potensi dan set desa sudah memperhatikan prinsip-prinsip ekologis? Bagaimana pengelolaan asset desa yang berkelanjutan tersebut?

3. Responsivitas Keberpihakan Pemerintah Desa

- a. Apa respons dari pemerintah desa terkait dengan pelibatan mereka dalam pengembangan sumber penghidupan?
- b. Apakah mereka diberi ruang penuh dalam proses dan pelibatan pengembangan penghidupan tersebut?
- c. Bagaimana dinamika dalam proses dan pelibatan mereka dalam pengembangan sumber penghidupan tersebut?
- d. Apakah pemdes memiliki data kelompok marjinal di desa?
- e. Bagaimana kelompok marjinal tersebut diberi ruang dalam pengelolaan aset desa?
- f. Adakah perdes yang mengatur atau memberikan ruang terhadap mereka dalam pengelolaan asset desa?

CURRICULUM VITAE

Nama: : Tri Hariyono, S.Sos.I
TTL : Temanggung, 21 April 1982
Agama : Islam
Alamat Asli : Dsn Sungapan RT 05, Jamusan, Kec Jumo,
Temanggung
Alamat Domisili : Sangrahan, RT 04, RW27, Sendangadi, Mlati,
Sleman.
Telp/HP : 081328868529
Email : trie_hariyono@ymail.com

Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Tahun
1.	MI Jamusan	1988-1994
2.	MTs Ma'arif Jumo	1994-1997
3.	MAN Temanggung	1997-2000
4.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2001-2006
5.	Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015-2020

Pendidikan Non Formal

No	Jenis Pendidikan & Pelatihan	Tema	Tahun
1	Diklat Kader Muda IPNU Ancab Jumo, Temanggung	Penguatan Kader Muda Nu dalam Kanchah Politik Rahmatan Lil Alamin	1997
2	Kursus Komputer	Windows, Word, Excel	1999-2000
3	Sekolah Pascasarjana CRCS UGM	Sekolah Pengelolaan Keragaman IV	2015
4	WorkShop Pemantapan Pengelola PKBM	Membangun Partisipasi Warga dalam Pemberdayaan Masyarakat	2005
5	Sarasehan	Empowerment for PKBM Program	2007
6	Pelatihan ICMC	Mobilisasi	2007

		Sumberdaya Komunitas	
7	Pelatihan ICMC	Manajemen yang Berkelanjutan untuk NGO	2007
8	Training Of Trainer Fasilitator FPLM	Mitigasi Bencana Bagi Santri dan Masyarakat	2010
9	Pelatihan Pemetaan Partisipatif (CCFD dan HPS Yogyakarta)	Pemetaan Partisipatif Tiga Dimensi Untuk Pengurangan Resiko Bencana	2011
10	Pelatihan Survey dan Supervisor (Rifka Annisa Yogyakarta)	Pelatihan Survey dan Supervisor untuk Penelitian Maskulinitas, Kesehatan dan Pengalaman Hidup Laki-laki	2012
11	<i>Traning</i> Pendamping Desa (IRE Yogyakarta)	Pelatihan Cara Menyusun Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang Partisipatif	2017
12	<i>Traning</i> Pendamping Desa (IRE Yogyakarta)	Pelatihan bagi <i>Community Organizer (CO)</i>	2018

Pengalaman Organisasi

No	Pengalaman Organisasi	Posisi Strategis	Tahun
1	ORBID “Organisasi Bina Desa”	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2004-2005
2	Sepijak (Sedulur Jalan Kota Yogyakarta)	Fasilitator dan pendamping klien	2004-2006
3	PKBM Suka Caturtunggal	Bidang Pengembangan Program	2005-2006
4	Taman Bacaan Masyarakat Suka Caturtunggal	Pengelola	2006-2007

5	FSPP (Forum Silaturahmi Pesantren dan Petani)	Community Organizer	2008-2010
6	FPLM (Forum Pesantren Lereng Merapi)	Co Fasilitator	2010-2013
7	Forum Sleman SOBAT	Koordinator Simpul	2010-2015
8	SPI (Serikat Petani Indonesia) Wilayah Yogyakarta	Ketua Biro Konsolidasi Organisasi	2009-2014
9	SPI (Serikat Petani Indonesia) Wilayah Yogyakarta	Ketua Badan Pelaksana Wilayah	2015-2019
10	Kelompok Pedesaan Regional (KSP) Swabina Jatengsel-DIY	Community Organizer	2017-Sekarang

Pengalaman Kerja

No	Instansi Pekerjaan	Posisi	Tahun
1	Commuter Survey Jabodetabek Pustral UGM	Supervisor	2010
2	PSPK (Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan) UGM	Pendamping Masyarakat Korban Erupsi untuk pemulihan pertanian	2010-2012
3	Pusat Studi Islam UII	Peneliti Lapangan	2011
4	LSM Rifka Annisa	Pencari data Lapangan untuk penelitian Kesehatan Laki-laki di Purworejo	2012
5	Indikator Politik Indonesia	Pencari Data Lapangan	2014
6	Jurusan IKS UIN Sunan kalijaga	Supervisor Praktikum Mahasiswa	2014-2015
7	Mubyarto Institute	Fasilitator Sekolah Tani Muda	2014-2016
7	Swara Nusa Institute	Manajer Devisi	2016-

	Kulonprogo	Pemberdayaan Masyarakat	Sekarang
8	Bidang Perumahan DPUPKP Kabupaten Sleman	Tenaga Fasilitator Lapangan	2016-Sekarang

Karya Tulis

No	Judul Buku/Artikel/Modul	Diterbitkan/Tidak	Tahun	Penerbit
1	Pengembangan Masyarakat Perspektif Ilmu Sosial Profetik	Diterbitkan	2004	Jurnal Populis
2	Pendidikan Populer sebagai Strategi dalam Pengembangan Masyarakat	Diterbitkan	2007	Jurnal Populis
3	Pengembangan Masyarakat di Tengah Dinamika Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Indonesia	Diterbitkan	2009	Jurnal PMI
4	Membangun Kebijakan yang Humanis dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan	Diterbitkan	2011	Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga
5	Babonisasi Sebagai Program Inovatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Masyarakat	Diterbitkan	2013	Jurnal PMI
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Praktek Pekerjaan Sosial: Suatu Tinjauan dari Perspektif Islam	Diterbitkan	2013	Jurnal PMI
7	Aktualisasi Mistik sebagai Media	Diterbitkan	2013	Jurnal Welfare

	Pekerjaan Sosial			
8	Kedaulatan Pangan Sebagai Gerakan Sosial: Refleksi Memperingati HUT SPI	Diterbitkan	2011	Web SPI
9	Asas Kerakyatan Bagi Petani	Diterbitkan	2012	Web SPI
10	HAM untuk Petani: Sebuah Agenda Tersisa, Refleksi Memperingati Hari HAM	Diterbitkan	2011	Web SPI
11	Dari Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan: Refleksi Memperingati Hari Pangan Sedunia	Diterbitkan	2011	Web SPI
12	Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Petani: Refleksi Hari Tani Nasional	Diterbitkan	2011	Web SPI
13	Puasa, Pangan dan Kesejahteraan Patani	Diterbitkan	2011	Web SPI
14	Dimensi Lain Kekuatan Petani	Diterbitkan	2012	Web SPI
15	Menghidupkan Tanah Mati untuk Kesejahteraan Petani: Belajar dari Sejarah Nabi Muhammad SAW	Diterbitkan	2013	Web SPI
16	Tradisi Slametan (Wilujengan) dalam Masyarakat Agraris	Diterbitkan	2015	Web SPI
17	Agroekologi untuk Kesejahteraan Petani	Diterbitkan	2016	Web SPI
18	Politik Agraria untuk Kesejahteraan Petani	Diterbitkan	2016	Web SPI
19	Puasa sebagai Tirakat Sosial	Diterbitkan	2016	Web SPI

20	Tugas Negara dalam Reforma Agraria dan Alih Fungsi lahan	Diterbitkan	2016	Web SPI
21	Menuju Kebijakan Pangan yang Berkeadilan: Refleksi Hari Pangan Sedunia 2016	Diterbitkan	2016	Web SPI
22	Membangun Kebijakan Pangan yang Sensitif Gender	Diterbitkan	2016	Web SPI
23	Modul: Panduan Pelatihan untuk Pertanian Bagi Generasi Muda Indonesia	Diterbitkan	2016	Bina Desa
24	Desa dan Reforma Agraria di Indonesia	Diterbitkan	2017	Web SPI
25	Reforma Agraria dari Desa	Diterbitkan	2017	Web SPI
26	Membangun Kerukunan Produksi untuk Kesejahteraan Petani	Diterbitkan	2017	Web SPI
27	Modul: Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi	Diterbitkan	2018	SNI dan VOICE
28	Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi (PADI)	Diterbitkan	2019	Swara Nusa Institute

CURRICULUM VITAE

Nama: : Tri Hariyono, S.Sos.I
TTL : Temanggung, 21 April 1982
Agama : Islam
Alamat Asli : Dsn Sungapan RT 05, Jamusan, Kec Jumo,
Temanggung
Alamat Domisili : Sanggrahan, RT 04, RW27, Sendangadi, Mlati,
Sleman.
Telp/HP : 081328868529
Email : trie_hariyono@ymail.com

Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Tahun
1.	MI Jamusan	1988-1994
2.	MTs Ma'arif Jumo	1994-1997
3.	MAN Temanggung	1997-2000
4.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2001-2006
5.	Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015-2020

Pendidikan Non Formal

No	Jenis Pendidikan & Pelatihan	Tema	Tahun
1	Diklat Kader Muda IPNU Ancab Jumo, Temanggung	Penguatan Kader Muda Nu dalam Kanchah Politik Rahmatan Lil Alamin	1997
2	Kursus Komputer	Windows, Word, Excel	1999-2000
3	Sekolah Pascasarjana CRCS UGM	Sekolah Pengelolaan Keragaman IV	2015
4	WorkShop Pemantapan Pengelola PKBM	Membangun Partisipasi Warga dalam Pemberdayaan Masyarakat	2005
5	Sarasehan	Empowerment for PKBM Program	2007
6	Pelatihan ICMC	Mobilisasi	2007

		Sumberdaya Komunitas	
7	Pelatihan ICMC	Manajemen yang Berkelanjutan untuk NGO	2007
8	Training Of Trainer Fasilitator FPLM	Mitigasi Bencana Bagi Santri dan Masyarakat	2010
9	Pelatihan Pemetaan Partisipatif (CCFD dan HPS Yogyakarta)	Pemetaan Partisipatif Tiga Dimensi Untuk Pengurangan Resiko Bencana	2011
10	Pelatihan Survey dan Supervisor (Rifka Annisa Yogyakarta)	Pelatihan Survey dan Supervisor untuk Penelitian Maskulinitas, Kesehatan dan Pengalaman Hidup Laki-laki	2012
11	Traning Pendamping Desa (IRE Yogyakarta)	Pelatihan Cara Menyusun Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang Partisipatif	2017
12	Traning Pendamping Desa (IRE Yogyakarta)	Pelatihan bagi <i>Community Organizer (CO)</i>	2018

Pengalaman Organisasi

No	Pengalaman Organisasi	Posisi Strategis	Tahun
1	ORBID "Organisasi Bina Desa"	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2004-2005
2	Sepijak (Sedulur Jalan Kota Yogyakarta)	Fasilitator dan pendamping klien	2004-2006
3	PKBM Suka Caturtunggal	Bidang Pengembangan Program	2005-2006
4	Taman Bacaan Masyarakat Suka Caturtunggal	Pengelola	2006-2007

5	FSPP (Forum Silaturahmi Pesantren dan Petani)	Community Organizer	2008-2010
6	FPLM (Forum Pesantren Lereng Merapi)	Co Fasilitator	2010-2013
7	Forum Sleman SOBAT	Koordinator Simpul	2010-2015
8	SPI (Serikat Petani Indonesia) Wilayah Yogyakarta	Ketua Biro Konsolidasi Organisasi	2009-2014
9	SPI (Serikat Petani Indonesia) Wilayah Yogyakarta	Ketua Badan Pelaksana Wilayah	2015-2019
10	Kelompok Pedesaan Regional (KSP) Swabina Jatengsel-DIY	Community Organizer	2017-Sekarang

Pengalaman Kerja

No	Instansi Pekerjaan	Posisi	Tahun
1	Commuter Survey Jabodetabek Pustral UGM	Supervisor	2010
2	PSPK (Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan) UGM	Pendamping Masyarakat Korban Erupsi untuk pemulihan pertanian	2010-2012
3	Pusat Studi Islam UII	Peneliti Lapangan	2011
4	LSM Rifka Annisa	Pencari data Lapangan untuk penelitian Kesehatan Laki-laki di Purworejo	2012
5	Indikator Politik Indonesia	Pencari Data Lapangan	2014
6	Jurusan IKS UIN Sunan kalijaga	Supervisor Praktikum Mahasiswa	2014-2015
7	Mubyarto Institute	Fasilitator Sekolah Tani Muda	2014-2016
7	Swara Nusa Institute	Manajer Devisi	2016-

	Kulonprogo	Pemberdayaan Masyarakat	Sekarang
8	Bidang Perumahan DPUPKP Kabupaten Sleman	Tenaga Fasilitator Lapangan	2016-Sekarang

Karya Tulis

No	Judul Buku/Artikel/Modul	Diterbitkan/Tidak	Tahun	Penerbit
1	Pengembangan Masyarakat Perspektif Ilmu Sosial Profetik	Diterbitkan	2004	Jurnal Populis
2	Pendidikan Populer sebagai Strategi dalam Pengembangan Masyarakat	Diterbitkan	2007	Jurnal Populis
3	Pengembangan Masyarakat di Tengah Dinamika Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Indonesia	Diterbitkan	2009	Jurnal PMI
4	Membangun Kebijakan yang Humanis dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan	Diterbitkan	2011	Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga
5	Babonisasi Sebagai Program Inovatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Masyarakat	Diterbitkan	2013	Jurnal PMI
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Praktek Pekerjaan Sosial: Suatu Tinjauan dari Perspektif Islam	Diterbitkan	2013	Jurnal PMI
7	Aktualisasi Mistik sebagai Media	Diterbitkan	2013	Jurnal Welfare

	Pekerjaan Sosial			
8	Kedaulatan Pangan Sebagai Gerakan Sosial: Refleksi Memperingati HUT SPI	Diterbitkan	2011	Web SPI
9	Asas Kerakyatan Bagi Petani	Diterbitkan	2012	Web SPI
10	HAM untuk Petani: Sebuah Agenda Tersisa, Refleksi Memperingati Hari HAM	Diterbitkan	2011	Web SPI
11	Dari Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan: Refleksi Memperingati Hari Pangan Sedunia	Diterbitkan	2011	Web SPI
12	Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Petani: Refleksi Hari Tani Nasional	Diterbitkan	2011	Web SPI
13	Puasa, Pangan dan Kesejahteraan Patani	Diterbitkan	2011	Web SPI
14	Dimensi Lain Kekuatan Petani	Diterbitkan	2012	Web SPI
15	Menghidupkan Tanah Mati untuk Kesejahteraan Petani: Belajar dari Sejarah Nabi Muhammad SAW	Diterbitkan	2013	Web SPI
16	Tradisi Slametan (Wilujengan) dalam Masyarakat Agraris	Diterbitkan	2015	Web SPI
17	Agroekologi untuk Kesejahteraan Petani	Diterbitkan	2016	Web SPI
18	Politik Agraria untuk Kesejahteraan Petani	Diterbitkan	2016	Web SPI
19	Puasa sebagai Tirakat Sosial	Diterbitkan	2016	Web SPI

20	Tugas Negara dalam Reforma Agraria dan Alih Fungsi lahan	Diterbitkan	2016	Web SPI
21	Menuju Kebijakan Pangan yang Berkeadilan: Refleksi Hari Pangan Sedunia 2016	Diterbitkan	2016	Web SPI
22	Membangun Kebijakan Pangan yang Sensitif Gender	Diterbitkan	2016	Web SPI
23	Modul: Panduan Pelatihan untuk Pertanian Bagi Generasi Muda Indonesia	Diterbitkan	2016	Bina Desa
24	Desa dan Reforma Agraria di Indonesia	Diterbitkan	2017	Web SPI
25	Reforma Agraria dari Desa	Diterbitkan	2017	Web SPI
26	Membangun Kerukunan Produksi untuk Kesejahteraan Petani	Diterbitkan	2017	Web SPI
27	Modul: Analisis Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi	Diterbitkan	2018	SNI dan VOICE
28	Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Pengelolaan Aset Desa yang Inklusi (PADI)	Diterbitkan	2019	Swara Nusa Institute